

Pendidikan dan Kelahiran Elite Tionghoa di Surabaya pada 1880-an hingga 1942

(Forging Futures: The Role of Education in Shaping the Chinese Elite in Surabaya (1880s-1942))

Shinta Devi Ika Santhi Rahayu^{1,3*}
Singgih Tri Sulistiyono²
Dhanang Respati Puguh²
Alamsyah²

¹Program Studi Doktor Sejarah, Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro

²Departemen Sejarah, Universitas Diponegoro

^{1,2}Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 50275

^{1,2}Tel.: +62(24)7460012

³Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam, Gubeng, Surabaya, 60286

Tel.: +62(31)5035676

*Surel: shinta-d-i-s-r@fib.unair.ac.id

Diterima: 13 Juli 2023

Direvisi: 27 Desember 2023

Disetujui: 29 Desember 2023

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran pendidikan dalam menghasilkan kelompok elite Tionghoa di Surabaya pada periode 1880-an hingga 1942. Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan komunitas Tionghoa. Bagi komunitas Tionghoa, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media menanamkan budaya, tetapi juga menanamkan semangat mencapai kesetaraan, sehingga pendidikan menjadi bagian dari gerakan emansipasi. Keberhasilan pendidikan komunitas Tionghoa dapat dilihat dari munculnya kelompok elite Tionghoa yang siap membawa perubahan-perubahan bagi komunitas Tionghoa. Oleh sebab itu, artikel bertujuan memberi penjelasan peran kelompok elite dalam mengarahkan tujuan pendidikan agar sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan generasi Tionghoa. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hasil pendidikan yang diikuti oleh komunitas Tionghoa adalah munculnya beragam kelompok elite Tionghoa. Keberagaman kelompok elite Tionghoa yang muncul pada akhir abad ke-19 hingga 1942 turut mewarnai corak khas sejarah masyarakat kota Surabaya, yaitu kemunculan tokoh-tokoh Tionghoa yang menjadi penggagas semangat kebangsaan Indonesia dan membantu mengurangi persoalan kesehatan dan pendidikan.

Kata kunci: elite, pendidikan, Surabaya, Tionghoa

Abstract

This article delves into the crucial role of education in the formation of the Chinese elite in Surabaya from the 1880s to 1942. Education held immense significance within the Chinese

223



community, serving not only as a vehicle for cultural preservation but also as a means of instilling a spirit of equality, positioning education as an integral component of the emancipation movement. The success of Chinese community education is evidenced by the emergence of a cadre of Chinese elites poised to effect transformative changes within their community. Consequently, this article seeks to explain the role of the elite in steering educational objectives to align with contemporary progress and the evolving needs of the Chinese generation. Employing historical methods, the research highlights that the educational pursuits of the Chinese community bore fruit in the form of diverse elite groups. The varied Chinese elite groups that surfaced from the late 19th century to 1942 significantly contributed to the unique narrative of Surabaya's history. Their contributions include catalyzing the Indonesian national spirit and addressing health and education challenges.

Keywords: Chinese, education, elite, Surabaya

PENDAHULUAN

Di dalam struktur sosial komunitas Tionghoa, masyarakat diatur berdasarkan suatu norma atau sila yang penting, disebut Tao-T'ung atau norma tentang jalan hidup. Di dalam norma tersebut, mereka terikat oleh lima sila yang mengatur hubungan dengan pemerintah, orangtua, suami istri, saudara, dan teman (Hsu 1983, 93). Norma tersebut juga diterapkan oleh komunitas Tionghoa di Hindia Belanda sehingga sebagian dari mereka menjadi komunitas yang mudah diatur dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Untuk semakin memudahkan pengaturan dan pengawasan, pemerintah menunjuk orang Tionghoa yang memiliki kewibawaan sosial untuk memimpin komunitas. Mereka diberi jabatan opsir dengan pangkat militer, yaitu mayor, kapten, dan letnan (Boachi 1856, 280).

Struktur sosial komunitas Tionghoa mengalami perubahan ketika pada periode 1880-an muncul elite modern. Awalnya terjadi kolaborasi antara opsir Tionghoa dengan kelompok elite yang baru muncul tersebut. Namun, sedikit demi sedikit mulai bergerak menggeser pengaruh opsir Tionghoa, yaitu kelompok elite yang dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda (Suryadinata 1994, 24). Hans Dieters-Ever (dalam Susan 2019, 79) berpendapat bahwa figur elite selalu ada dalam kelompok masyarakat, mereka memiliki pengaruh dan kekuasaan mengarahkan tindakan individu-individu melalui wacana publik. Penyebaran wacana publik ini seiring dengan pertumbuhan pers sebagai media komunikasi. Periode 1880-an merupakan periode awal penyebaran wacana publik melalui pers oleh komunitas Tionghoa. Pers menjadi wahana yang lebih bebas untuk menyampaikan gagasan, ideologi, kritik sosial, dan pembaharuan yang menentang ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi akibat kolonialisme (Kartodirdjo 1992, 116). Pertumbuhan pers berbahasa Melayu-Tionghoa di Surabaya dibuktikan dengan kemunculan beberapa surat kabar dan majalah yang dikelola oleh komunitas Tionghoa Peranakan, di antaranya adalah *Bintang Timor* (Adam 2003, 111), *Loen Boen* (Suryadinata 1988, 43), dan *Pewartar Soerabaia* (Riyanto 2000, 69).

Secara etimologis, istilah *elite* berasal dari kata Latin, yaitu *eligere* 'memilih.' Dalam beberapa periode berikutnya, istilah ini mengalami perluasan makna. Pada abad ke-14, istilah ini berkembang menjadi *a choice of persons* yang artinya adalah orang-orang pilihan. Pada abad ke-18 istilah tersebut dipakai ke dalam bahasa Prancis untuk menyebut sekelompok orang yang memegang posisi penting dalam masyarakat. Menurut Bottomore (dalam Sarkawi 2015, 12–13), istilah elite digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam masyarakat. Dalam klasifikasi masyarakat, Pareto membedakan antara kelompok elite penguasa yang duduk dalam jabatan pemerintah dan

nonpemerintah. Kelompok elite pemerintah memperoleh kedudukan di masyarakat karena memiliki kekuasaan politik. Kelompok ini tidak memerlukan massa demi menentukan maupun melaksanakan kebijakan politik yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya (Sarkawi 2015, 13).

Pada masa kolonial Belanda, sangat sedikit orang Tionghoa yang menduduki posisi elite pemerintah. Sebagian besar orang Tionghoa, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah, berhasil menempati klasifikasi elite nonpejabat pemerintah. Mereka menjadikan massa sebagai instrumen penting untuk memperkuat kedudukannya. Oleh sebab itu, kalangan elite nonpemerintah harus memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan melibatkan diri dalam kegiatan komunitas yang ia pimpin.

Kemunculan kelompok elite adalah hasil kesadaran terhadap pendidikan dan dalam perkembangannya di antara mereka ada yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai elite pemerintah dan nonpemerintah. Di kalangan bumiputera pertumbuhan pendidikan didorong oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda membuka pintu gerbang ke Barat bagi kelompok bangsawan atau bumiputera terpadang (Groeneboer 1995, 231). Etnis Tionghoa memiliki pengalaman yang berbeda, kesadaran terhadap pentingnya pendidikan didorong oleh semangat mengidentifikasi kembali identitas ketionghoan dan penyebaran gagasan nasionalisme Tiongkok.

Sejak periode awal, pendidikan etnis Tionghoa telah menarik perhatian beberapa penulis. Nio Joe Lan dalam artikelnya berjudul “De Tiong Hoa Hwee Koan Beweging,” mencermati pendidikan sebagai alat pergerakan etnis Tionghoa dan reaksi terhadap ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan Tionghoa. Melalui pendidikan mereka berusaha meraih impian untuk menyejajarkan diri dengan bangsa Eropa. Hal itu tercermin dari kurikulum pendidikan sekolah yang mereka kelola (Nio 1934).

Pada tahun yang sama, Kwee Tek Hoay dalam salah satu artikelnya berjudul “Pioneers dalam Gerakan Khong Kauw Surabaya” memberikan penjelasan tentang kemunculan kesadaran pendidikan di kalangan Tionghoa Peranakan. Dia berpendapat bahwa sekolah-sekolah Tionghoa yang tumbuh pada masa awal sangat dipengaruhi oleh gerakan Konfusianisme. Hal itu sekaligus sebagai penanda bahwa akhir abad ke-19 merupakan era awal pergerakan Tionghoa Peranakan (Kwee 1934).

R. van Diffelen dalam artikelnya berjudul “Het Onderwijs voor Chinezen.” Dia mencermati pendidikan sangat terkait dengan kepentingan politik. Sasaran Politik Etis adalah masyarakat bumiputera yang ditunjukkan dengan pembukaan sekolah. Sebagai kelompok yang kondisi ekonominya dipandang cukup mapan, etnis Tionghoa dipersilakan membuka sekolah sendiri (Diffelen 1936).

Leo Suryadinata adalah salah satu peneliti yang cukup mendetail dalam menjelaskan perkembangan dan perubahan pendidikan etnis Tionghoa. Keberhasilannya mengumpulkan beragam sumber menghasilkan sudut pandang yang lebih kompleks, yaitu menjelaskan pendidikan sebagai bagian dari kepentingan etnis Tionghoa sekaligus kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Leo juga menjelaskan bahwa ada aktor di belakang perkembangan sekolah-sekolah Tionghoa. Hal yang menarik adalah di antara aktor pendidikan adalah lulusan sekolah Belanda (Suryadinata 1988).

Shinta D. I. S. Rahayu dalam bukunya berjudul *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya* (2014) menganalisis bahwa dalam suatu periode, pendidikan untuk komunitas Tionghoa semakin mendekati komunitas Tionghoa Peranakan dengan Tionghoa Totok. Namun, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda menghasilkan komunitas Tionghoa yang beragam, yaitu yang berpendidikan sekolah berbahasa Belanda, Kuo Yu, dan Melayu. Masing-masing komunitas tersebut memiliki tokoh-tokoh elite yang berperan dalam mengarahkan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak Tionghoa. Namun, dalam buku tersebut belum dijelaskan secara mendetail tentang elite Tionghoa.

Di antara elite Tionghoa ada yang mengarahkan pendidikan untuk menanamkan kesadaran identitas budaya, identitas politik, dan memudahkan memperoleh pekerjaan. Beragam pendapat mengakibatkan perdebatan di antara kelompok elite dalam menentukan corak dan orientasi pendidikan yang sesuai bagi generasi Tionghoa.

Kekurangan informasi tentang hasil penelitian yang membahas tentang kelompok elite di tingkat lokal yang berpengaruh terhadap dinamika pendidikan etnis Tionghoa menjadi alasan pentingnya kajian pendidikan dan kelahiran elite Tionghoa di Surabaya pada periode 1880-an hingga 1942. Kajian ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi menentukan topik, mengumpulkan sumber atau heuristik, kritik sumber, intrepertasi, dan penulisan atau historiografi. Sumber diperoleh dari beberapa tempat, yaitu koleksi digital Universitas Leiden dan Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Jogja Library Centre, Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur. Sumber yang digunakan di antaranya adalah majalah dan surat kabar yang terbit pada masa kolonial Belanda seperti *Sin Po*, *Bintang Soerabaia*, *Hoakiao*, dan *Bataviaasch Nieuwsblad*. Selain itu, juga digunakan publikasi resmi seperti *Verslag Der Gemeente Soerabaja* dan *Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja*. Setelah data dikumpulkan, dilakukan verifikasi untuk mengetahui keaslian dan kredibilitas sumber. Setelah dipastikan sumbernya valid, dilakukan analisis, dan tahap terakhir adalah penulisan atau historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnis Tionghoa di Surabaya pada Akhir Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20

Etnis Tionghoa merupakan salah satu komunitas yang memiliki peran penting dalam sejarah masyarakat Surabaya. Peran mereka juga ditunjang oleh jumlah yang cukup banyak, bahkan menempati urutan pertama di antara kelompok pendatang yang berasal dari luar Hindia Belanda (Tabel 1). Peningkatan jumlah etnis Tionghoa di Surabaya disebabkan derasnya arus migrasi dari Tiongkok ke Surabaya. Kekacauan politik dan ekonomi di Tiongkok menjadi alasan utama kedatangan ke Surabaya (Djhung 2022)

Tabel 1. Data Perkembangan Penduduk Surabaya Tahun 1920–1930

Tahun	Eropa	Tionghoa	Arab	Timur Asing	Bumiputera
1921	19.524	23.206	3.155	363	146.810
1922	20.105	27.595	3.410	504	148.000
1923	20.855	30.653	3.639	644	149.000
1924	22.153	32.005	3.818	847	150.000
1925	23.314	32.868	3.922	870	196.825

Tahun	Eropa	Tionghoa	Arab	Timur Asing	Bumiputera
1926	24.372	33.370	4.040	981	188.977
1927	23.782	35.077	4.078	1.008	188.977
1930	26.502	42.768	4.994	1.303	265.872

(Sumber: *Verslag Der Gemeente Soerabaja over Het Jaar 1927 dan 1940; Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja 1931*)

Tidak dapat diingkari bahwa keberadaan etnis Tionghoa menjadi penggerak roda perekonomian sehingga Surabaya tumbuh menjadi kota terbesar kedua setelah Batavia. Peran dan aktivitas ekonomi dapat diketahui dari maraknya pertumbuhan toko-toko, industri gula, rokok, bioskop, kopi, dan pasar. Sumber-sumber berupa iklan surat kabar yang terbit pada akhir abad ke-19 menunjukkan bahwa kelompok Tionghoa menguasai sebagian aktivitas ekonomi di Surabaya, sehingga tidak mengherankan pada akhir abad ke-19 hingga 1942, komunitas Tionghoa kelahiran lokal yang disebut Peranakan berkembang menjadi komunitas yang mapan (Claver 2014, 138). Hal itu dibuktikan dengan kemampuan mereka menguasai industri gula, mengelola perkebunan, dan menyewa tanah-tanah yang sangat luas. Di antaranya yang berhasil berasal dari marga The, Tjoa, Tan, dan Han. Selain kemampuan mendekati pejabat Belanda, faktor kesuksesan disebabkan hubungan perkawinan dengan bangsawan Jawa sehingga selain dihormati komunitas Tionghoa, keturunan mereka juga dihormati oleh komunitas Jawa (Ong 2005, 81).

Beberapa orang Tionghoa yang berasal dari keluarga terpandang dan kaya, ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai opsir. Mereka adalah Tionghoa Peranakan yang dipilih berdasarkan kekayaan dan popularitas. Mereka memperoleh pangkat seperti anggota militer, misalnya kapten, mayor dan letnan dengan tugas mengawasi aktivitas komunitas Tionghoa (Boachi 1856, 280). Adapun beberapa Tionghoa Peranakan yang menduduki jabatan tersebut pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah Mayor The Sing Koo, Mayor The Goan Tjing, Kapten The Boen Hie, Mayor The Toan Ing, Letnan Tan Thwan Hing, Mayor Tie Ing Tjay, Letnan Tjoa Sien Hie, Letnan Tjoa Sien Ing, Mayor Tan Sing Tian, dan Letnan Tan Hie Sioe (The 2001, 9, 13, 18; Haryono 2017, 109; Handinoto 2015, 95). Hal yang menarik adalah, meskipun tidak memperoleh gaji (*Bintang Soerabaia* 6 Juli 1906), jabatan tersebut sering diperebutkan, karena memiliki nilai prestise yang tinggi. Selain itu, opsir Tionghoa juga memiliki hak terhadap sejumlah tanah partikelir (Phoa 1950, 5).

Selain memimpin komunitas Tionghoa yang berada di wilayah Pecinan, opsir Tionghoa juga berperan dalam pembangunan tempat ibadah (*Bintang Soerabaia* 7 Agustus 1906; Tjiong 1978, 75), mensponsori pembukaan sekolah-sekolah Tionghoa (Kwee 1934), dan mendukung gerakan menghidupkan kembali budaya Tionghoa melalui perkumpulan-perkumpulan berdasarkan ikatan primordial, misalnya Perkumpulan Hok Kian Kong Tik Soe dan Perkumpulan Buat Perbuatan Baik (*Sin Po* 9 Januari 1937, 20–21; Schlegel 1885, 7). Dukungan opsir Tionghoa terhadap pembukaan sekolah Tionghoa pada akhir abad ke-19 memberikan semangat dan perubahan sosial komunitas Tionghoa, yaitu kemunculan kelompok Tionghoa terdidik yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dan menjadi agen perubahan komunitas Tionghoa.

Pendidikan Etnis Tionghoa sebagai Gerakan Penyetaraan Kedudukan

Sebagai motor penggerak perdagangan dan industri, komunitas Tionghoa berhasil mengukuhkan posisi ekonominya. Hal itu juga didukung dengan kemampuan mereka menjalin hubungan yang baik dengan penguasa kolonial Belanda, jaringan kekerabatan di tingkat lokal hingga internasional, profesionalitas dalam manajemen, dan kekuatan modal (Wertheim 1956,

50). Namun, kontribusi di bidang ekonomi tidak sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap fasilitas lain yang mereka butuhkan. Hal itu dibuktikan dengan penunjukan wilayah Pecinan tidak disertai dengan pembangunan fasilitas tempat ibadah, sarana prasarana kesehatan, dan pendidikan. Semua fasilitas tersebut diusahakan secara mandiri oleh orang-orang Tionghoa (Tjieng 1929).

Komunitas Tionghoa menilai bahwa pemerintah telah bertindak tidak adil terhadap mereka. Ketidakadilan itu terbukti ketika pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memperhatikan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Eropa dan bumiputera. Adapun yang menjadi alasan adalah, sebagian besar orang Tionghoa hidup mapan sehingga mampu membuka sekolah sendiri. Pernyataan pemerintah didukung oleh laporan Dewan Gereja bahwa orang-orang Tionghoa mampu mendatangkan guru Tionghoa ke rumah untuk mengajar budaya Tionghoa dan mendatangkan guru Belanda untuk mengajar Bahasa Belanda. Ada pula yang membuka sekolah Tionghoa dan menjadikan ajaran Khonghucu sebagai pelajaran utama (Brugmans 1938, 50).

Seiring dengan kemunculan protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, di Tiongkok sedang terjadi pergolakan politik. Penghinaan yang dirasakan warga Tiongkok setelah kalah menghadapi serangan negara-negara Barat dan Jepang juga dirasakan oleh komunitas Tionghoa di Surabaya. Di lain pihak, kemenangan Jepang atas Rusia turut menimbulkan keyakinan bahwa Tiongkok akan mampu bangkit menjadi negara yang kuat seperti Jepang. Solidaritas sesama Tionghoa sebagai satu bangsa semakin kuat ketika datang imigran anggota organisasi Chung Kuo Tung Meng Hui, Zhonghe Tang, dan Guang Fu Hui (Salmon 2005, 137).

Penguatan solidaritas sesama etnis hingga lahirnya kesadaran kebangsaan di kalangan Tionghoa juga disebabkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mencegah proses integrasi. Tjieng Hiang Tung berpendapat bahwa hingga awal abad ke-20, kehidupan bersama di Hindia Belanda dibentuk tidak berhubungan sehingga tidak terbentuk ikatan budaya. Pada waktu itu tidak ada unsur pengikat yang menyatukan semua ras sehingga masing-masing ras memiliki dan mengejar cita-cita masing-masing. Identitas budaya Tionghoa menjadi semakin kuat ketika mengetahui situasi tanah leluhur (Tjieng 1929). Pada awalnya, nasionalisme yang terbentuk adalah nasionalisme budaya karena gerakan-gerakan yang dilakukan mengarah pada menghidupkan kembali budaya Tionghoa. Tampaknya keberadaan opir Tionghoa menjauhkan komunitas Tionghoa dari gerakan yang bersifat politik. Nasionalisme budaya ditunjukkan dengan sikap mengidentifikasi identitas ketionghoan. Mereka melakukan kritik terhadap adopsi adat istiadat Jawa di kalangan Tionghoa Peranakan, seperti yang dilakukan oleh seorang Tionghoa yang menggunakan nama pena Bintang Saturnus dalam artikelnya yang dimuat oleh surat kabar *Bintang Soerabaia*. Ia mengkritik kebiasaan orang-orang Tionghoa yang melakukan tradisi slametan (*Bintang Soerabaia* 14 Oktober 1902).

Nasionalisme budaya mendorong orang-orang Tionghoa mempelajari kembali adat istiadat dalam kitab-kitab klasik dan ajaran Khonghucu. Khonghucu menjelaskan tentang fungsi penting pendidikan sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan. Penjelasan tersebut menumbuhkan semangat mengembangkan pendidikan sebagai sarana untuk meraih posisi yang baik. Selain itu, ajaran Khonghucu tentang peradaban Tiongkok atau adat istiadat Tionghoa menjadi dasar membangun ikatan emosional Tionghoa Peranakan dengan Tiongkok (Anonim 1925, 12).

Upaya menyebarkan ajaran Khonghucu dilakukan oleh komunitas Tionghoa dengan cara mendirikan perkumpulan kematian dan pernikahan (Schlegel 1853, 3) membangun klenteng dan membuka sekolah. Kegiatan itu disponsori oleh opir Tionghoa. Dapat diduga bahwa keberadaan opir Tionghoa sebagai donatur adalah untuk meningkatkan popularitas, dukungan sekaligus mengawasi kurikulum pendidikan sekolah agar tidak mengganggu kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Di kemudian hari, kolaborasi antara kelompok Tionghoa pendukung nasionalisme Tiongkok dengan pendukung pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan polemik.

Ada dua sekolah Hokkian yang cukup populer di Surabaya, yaitu Sekolah Lam Yang Han Boen Kwan di Kapasan yang dibuka oleh Tjioe Ping Wie dan didukung oleh keluarga opir Tionghoa bermarga The pada akhir tahun 1870 (Kwee 1934) dan Sekolah Ho Tjiong Hak Tong di Keputran yang dibuka oleh Kapiten Liem Sioe Tien dan saudagar yang bergabung dalam perkumpulan Ho Tjiong Hak Kwan pada 5 November 1903 (*Javasche Courant* 20 Mei 1904, 40; Oen 1953). Kedua sekolah tersebut menganut sistem pendidikan modern karena meninggalkan metode menghafal.

Selain mengajarkan membaca dan menulis huruf Tionghoa, sekolah-sekolah Hokkian menekankan pendidikan moral yang diambil dari Kitab Klasik atau Tiongkok Kuno, yaitu *Sam Djie King* (Nio 1934, 48). Di dalam kitab tersebut, murid-murid ditanamkan agar mengutamakan sikap berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan persaudaraan, dan mengutamakan pendidikan.

*Hiang jioe leng, leng oen sip
Hauw ie tjhin, so tang tjip
Yoeng soe swee, leng djiang lee
Sioe hauw tee, tjhoe kian boen*

Hiang ketika berumur sembilan
Mengerti menghangati pembaringan
Berbakti terhadap orang tuwa
Suatu keharusan tak ketjiwa
Yoeng pada usia empat tahun
Mengalah dalam pembagian bebuahan
Ade terhadap jang pernah tuuan
Patut mengerti harganja perindahan
Utamakanlah perikeberbaktian serta persaudaraan
Kemudian baru mejakinkan peladjaran dan pengetahuan (*Tjerman* 1–15 Djuli 1950)

*Tjoe poet hak, hwie soe gie'
Joe poet hak, loo ho wie.
Giok poet tok, poet seng khie
Djin poet hak, poet tie gie*

Anak tidak sekolah, bukan suatu kepantasan
Ketjil tidak sekolah, tua tidak keurusan
Batu giok tidak diasah, tak akan merupakan perhiasan
Manusia tak bersekolah, tidak mengenal perikeharusan (*Tjerman* 1 Djuni 1950)

Selain mempelajari kitab *Sam Djie King*, murid-murid juga mendapatkan pelajaran menulis huruf Tionghoa atau Hanzi, adat istiadat Tionghoa, berhitung, ilmu Bumi Tiongkok, olah raga, musik, dan menggambar (Kwee 1934). Anak-anak Tionghoa yang berasal dari keluarga kaya, juga mendapatkan tambahan belajar bahasa Belanda dengan memanggil seorang guru bahasa Belanda ke rumah. Di lain pihak, ada pula anak-anak Tionghoa yang memperoleh pendidikan Sekolah Melayu dan memperoleh pengetahuan tentang budaya Tionghoa melalui pendidikan keluarga.

Nasionalisme Tiongkok yang merebak pada awal abad ke-20 turut memengaruhi gerakan Tionghoa Peranakan di Surabaya. Gerakan mereka mulai bersifat politis Untuk menanamkan semangat nasionalisme Tiongkok, Tionghoa Peranakan di Surabaya mendirikan perkumpulan Tionghoa Hwee Koan (T.H.H.K.) yang tujuan utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan (Oen 1953).

Sekolah T.H.H.K. Surabaya menggunakan kurikulum dan buku-buku yang sama dengan T.H.H.K. di kota lainnya, dengan tujuan menghasilkan standar lulusan yang sama. Ajaran Khonghucu dan adat istiadat Tionghoa menjadi dasar pendidikan karena berfungsi untuk mendidik moral dan menopang semangat nasionalisme Tiongkok. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa nasional Tiongkok, yaitu bahasa Tjeng Iem atau Kuo Yu yang di kemudian hari disebut dengan Mandarin. Pengetahuan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, menjadi daya tarik sekolah tersebut (*Bintang Soerabaia* 8 Agustus 1906). Meskipun keberadaan pelajaran bahasa Inggris diperdebatkan, Sekolah T.H.H.K. Surabaya mempertahankan Bahasa Inggris dengan alasan merupakan bahasa perdagangan. Kemampuan berbahasa Inggris juga bermanfaat membantu mereka membaca buku-buku dan majalah yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, sehingga memudahkan menyerap pengetahuan dari Barat (Rahayu 2014, 162; *Sin Po* 1935).

Untuk merespons meningkatnya gerakan di kalangan Tionghoa Peranakan, pada tahun 1908 pemerintah membuka Hollandsch Chineesche School (HCS). Di HCS, murid-murid Tionghoa memperoleh pelajaran membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Belanda, berhitung, ilmu Bumi, ilmu hewan dan tumbuhan, sejarah negeri Belanda dan Hindia Belanda, menyanyi, menggambar, dan bahasa Inggris (Goovars 2005, 89). Pelajaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda sengaja menjauhkan Tionghoa Peranakan dari budaya Tionghoa.

Pembukaan sekolah HCS pertama di Jalan Genteng mendapat respon sangat baik dari Mayor The Toan Ing dan kalangan Tionghoa Peranakan yang mengharapkan pembukaan Sekolah Belanda (*Bintang Soerabaia* 27 Januari 1908). Respon tersebut menunjukkan bahwa oleh sebagian Tionghoa Peranakan, pembukaan Sekolah Tionghoa bertujuan untuk memancing reaksi Pemerintah Kolonial Belanda, dan di pihak lain keputusan opsir Tionghoa mengirim anak-anaknya ke Sekolah Belanda membuktikan bahwa mereka memiliki kesadaran untuk selamanya tinggal di Hindia Belanda. Oleh sebab itu kemahiran berbahasa Belanda dan penyerapan budaya Barat memudahkan pergaulan dengan orang-orang Belanda. Selain itu, sebagai kelompok kelas menengah, sebagian Tionghoa Peranakan berharap suatu saat dipersamakan dengan kelompok Eropa. Dapat disimpulkan bahwa bagi komunitas Tionghoa, pendidikan adalah sebagai alat untuk menyetarakan kedudukan dan menjadi gerakan emansipasi. Hal yang menarik adalah Tionghoa Peranakan lulusan sekolah Barat tidak kehilangan identitas ketionghoan. Hal itu disebabkan pendidikan keluarga menjadi pilar menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Tedja 2006).

Keberadaan HCS yang menjadi pesaing T.H.H.K. mendorong komunitas Tionghoa bersikap kritis terhadap kedua jenis sekolah tersebut. Sebagian di antaranya menilai bahwa meskipun jumlah sekolah T.H.H.K. lebih banyak, dari segi kualitas dan fasilitas masih di bawah HCS (*Sin Po Wekelijksche Editie* 14 Februari 1931). Ada yang berpendapat bahwa keduanya belum memiliki standar ideal pendidikan yang sesuai kebutuhan generasi Tionghoa. Ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan T.H.H.K. tidak sesuai dengan kebutuhan generasi Tionghoa yang akan tinggal menetap di Hindia Belanda karena tidak mengajarkan Bahasa Melayu dan Belanda. Di pihak lain, HCS dipandang tidak sesuai karena tidak terdapat pelajaran yang mengajarkan budaya Tionghoa, sehingga mereka khawatir generasi Tionghoa kehilangan identitasnya (*Sin Po Wekelijksche Editie* 3 September 1938). Pro dan kontra terhadap sekolah T.H.H.K. dan HCS juga diperkuat oleh, pertama, kebijakan status Eropa untuk Tionghoa Peranakan yang bisa berbahasa Belanda pada tahun 1907 (Suryadinata 1994, 35). Kedua, undang-undang kewarganegaraan Tiongkok pada tahun 1909 yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa kelahiran Tiongkok dan di luar Tiongkok adalah bangsa Tiongkok. Ketiga, undang-undang tentang Kaula Negara Belanda atau *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschaap* pada tahun 1910. Keempat, penandatanganan perjanjian konsuler antara Tiongkok dengan Belanda yang menyatakan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda, Negeri Belanda, dan wilayah kekuasaan Belanda harus tunduk terhadap kebijakan pemerintah Belanda, tetapi mereka bebas memilih kewarganegaraan ketika meninggalkan wilayah tersebut. Kelima, peningkatan kemapanan komunitas Tionghoa Totok. Keenam, kemunculan rasa kebangsaan Indonesia oleh sebagian Tionghoa Peranakan. Ketujuh, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan di kalangan perempuan Tionghoa (Rahayu 2014, 227–228, 270).

Kritik dan ketidakpuasan terhadap HCS dan T.H.H.K. mendorong orang-orang Tionghoa mendirikan beragam sekolah. Sejak 1914 hingga 1940 di Surabaya telah dibuka 19 sekolah, yang meliputi sekolah tingkat dasar dan menengah (Tabel 2).

Tabel 2. Sekolah yang Dibuka oleh Komunitas Tionghoa pada 1914–1940

Nama Sekolah	Tahun	Alamat	Tujuan
Kiauw Tong Ja Hak	1914	Kapasan Straat	Menampung anak-anak Tionghoa miskin yang tidak tertampung di Sekolah T.H.H.K. dan HCS
Hwie Tiauw Ka Hwee Kwan	1920	Bakmi Straat	Menampung anak-anak Tionghoa dari Suku Hakka yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS
National HCS	1925	Kerk Straat 14	Memberikan pendidikan Barat, tetapi tanpa menghilangkan budaya Tionghoa dengan cara memberi pelajaran Bahasa Kuo Yu
Sekolah Malam Chung Hsioh	1926	Baliwerti Straat	Memberikan pendidikan untuk orang Tionghoa usia dewasa yang tidak sempat memperoleh pendidikan sekolah
Hoa Kiauw Tiong Hak	1929	Jagalan Straat	Sekolah tingkat menengah untuk anak-anak Tionghoa
Nan Hoa Siě Siao	1930	Bunguran Straat	Menampung anak-anak dari Suku Kwangtung yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS
Hoa Chiao Siě Siao	1930an	Bibis Straat	Menampung anak-anak Tionghoa yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya

Nama Sekolah	Tahun	Alamat	Tujuan
Hwa Kiang Hak Hauw	1930an	-	dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS Menampung anak-anak Tionghoa yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS
Kuang Hoa School	1930an	Bunguran Straat	Menampung anak-anak Tionghoa miskin yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS
Tung Shan	1930an	Gembong Straat	Menampung anak-anak Tionghoa yang tidak tertampung di sekolah Tionghoa sebelumnya dan terlalu mahal untuk mendaftar ke HCS
Li Tzee Chung Hsueh	1930	Pecindilan Straat, kemudian pada tahun 1931 pindah ke Donokerto Straat	Sekolah khusus untuk anak-anak perempuan Tionghoa, bertujuan memberikan pendidikan keterampilan dalam berumah tangga, mempersiapkan generasi perempuan Tionghoa agar memperoleh pendidikan sekolah menengah dan tinggi dan menjawab kebutuhan terhadap bahasa Belanda, Inggris dan Melayu yang tidak diajarkan di sekolah Tionghoa sebelumnya
Tiong Hwa Lie Hak Hauw	1931	-	Sekolah khusus untuk anak-anak perempuan Tionghoa bertujuan memberikan pendidikan keterampilan dalam berumah tangga, mempersiapkan generasi perempuan Tionghoa agar memperoleh pendidikan sekolah menengah dan tinggi dan menjawab kebutuhan terhadap bahasa Belanda, Inggris dan Melayu yang tidak diajarkan di sekolah Tionghoa sebelumnya
Chung Kuo Nu Hsueh	1931	Kapasari Straat	Sekolah khusus untuk anak-anak perempuan Tionghoa bertujuan memberikan pendidikan keterampilan dalam berumah tangga, mempersiapkan generasi perempuan Tionghoa agar memperoleh pendidikan sekolah menengah dan tinggi dan menjawab kebutuhan terhadap bahasa Belanda, Inggris dan Melayu yang tidak diajarkan di sekolah Tionghoa sebelumnya
Sekolah Nan Yang atau Sekolah Partai Tionghoa Indonesia	1932	Kapasan Straat	Sekolah tingkat dasar yang dibuka oleh Partai Tionghoa Indonesia dan menerima semua anak tanpa membedakan latar belakang etnis, bertujuan memberikan pengetahuan Barat dan menanamkan semangat nasionalisme Indonesia
Shin Hua Chung Hsioh atau Shin Hua High School	1934	Kaliondo Straat, kemudian pindah ke Ngaglik Straat	Sekolah menengah dan menengah atas yang merupakan gabungan Li Tzee Chung Hsueh dan Hwa Kiauw Chung Hsueh, bertujuan untuk menjawab kebutuhan terhadap sekolah menengah agar semakin banyak anak Tionghoa dapat melanjutkan ke jenjang sekolah tinggi di Singapura dan Tiongkok
Taman Kanak-Kanak Hua Chiao Tsing Nien Hui	1936	Jagalan Straat	Sekolah taman kanak-kanak yang memberi bekal pengetahuan tentang budi pekerti Tionghoa
Hua Chiao Tsing Nien Hui Commercial School	1936	Jagalan Straat	Sekolah tingkat menengah yang bertujuan memberi bekal latihan kerja agar generasi Tionghoa mudah memperoleh pekerjaan

Nama Sekolah	Tahun	Alamat	Tujuan
Hollandsch Chineesche School Chung Hwa Hui	1938	-	Reaksi anggota Chung Hwa Hui menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda membuka Maleis Chinese Scholen, yaitu sekolah berbahasa pengantar bahasa Melayu untuk anak-anak Tionghoa Miskin
Sekolah Shin Ming	1940	Kapasan Straat	Sekolah yang diselenggarakan oleh pengurus Perkumpulan Boen Bio untuk memberantas buta huruf anak-anak Tionghoa dari keluarga miskin.

(Sumber: Diolah dari *Pewarta Soerabaia* 26 Oktober 1916, *Pewarta Soerabaia* 29 Juli 1941, *Edisi Khusus HUT ke-190 Perkumpulan Hwie Tiauww Ka Hwee Kwan, Ta Kung Siang Po* 17 dan 29 Januari 1959, *Shin Hwa High School Surabaya 1934–2002*, *Swara Publik* 18 Februari 1931, *Swara Publik* 30 September 1929, *Sin Po Wekelijke Editie* 12 Juni 1928, *Sin Po Wekelijke Editie* 22 November 1941, *Djawa Tengah* 9 Februari 1927, *Sin Jit Po* 12 Juli 1926, *Berita Soerabaja* 15 September 1936, *Soerabaijasch Handelsblad* 1 April 1932, dan *Sin Tit Po* 17 Agustus 1937.)

Beragam sekolah yang dibuka untuk anak-anak Tionghoa pada akhir abad ke-19 hingga awal 1942 (Tabel 2) menghasilkan kelompok elite yang beragam. Meskipun bergerak di bidang yang beragam, mereka memberi perhatian terhadap beragam kebutuhan komunitas Tionghoa, termasuk di antaranya kebutuhan terhadap pendidikan yang sesuai untuk generasi Tionghoa. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah tidak semua lulusan sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda berorientasi kepada pemerintah kolonial Belanda. Beberapa di antaranya justru menyebarkan semangat kebangsaan Indonesia di kalangan Tionghoa Peranakan. Hal serupa juga terjadi pada pendidikan sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Pendidikan mengantar generasi Tionghoa bebas dari buta huruf dan menambah kemampuan berbahasa Tionghoa, Belanda, Inggris, dan Melayu. Kemampuan tersebut menjadi jendela memperkaya ilmu pengetahuan dari beragam bahan bacaan, yaitu buku, surat kabar, dan majalah yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga 1942. Berbekal wawasan yang luas, mereka dapat memperluas pergaulan dengan orang-orang non-Tionghoa, termasuk di antaranya adalah kelompok bumiputera, sehingga kolaborasi antara pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, perkembangan dunia penerbitan, dan interaksi sosial dengan beragam kelompok masyarakat menghasilkan beragam kelompok elite.

Tokoh-tokoh Elite Tionghoa di Surabaya

Beragam pendidikan yang berkembang di Surabaya menghasilkan kelompok elite yang beragam. Ada yang menempati posisi ganda, yaitu menjadi elite pemerintah sekaligus nonpemerintah. Posisi ganda tersebut di satu sisi menguntungkan komunitas Tionghoa karena diharapkan menjembatani suara atau kepentingan mereka agar disampaikan kepada pemerintah, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa keberadaan tokoh elite pemerintah akan membatasi ruang gerak organisasi atau perhimpunan Tionghoa.

1. Ang Tie Siang

Ia lahir di Babat dan memperoleh pendidikan di Surabaya. Pendidikan sekolah dasar ia peroleh di Instituut Buys, kemudian pindah ke HCS, dan melanjutkan ke Emma School Surabaya. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia aktif dalam perkumpulan Hua Chiao Tsing Nien Hui (Tan 1935, 7), yaitu sebuah perkumpulan yang bertujuan mengembangkan pendidikan, sosial dan olah raga untuk generasi muda Tionghoa (Taruna Nan Harapan 1960)

2. Go Tik Kiong

Ia alumnus sekolah Shin Hua Chung Hsioh. Setelah lulus sekolah, ia aktif dalam bidang jurnalistik dengan menerbitkan majalah *Sin Tjung* dan *Suara Publik*. Rasa cinta terhadap Indonesia ia tunjukkan dengan keikutsertaan dalam gerakan anti Jepang, membantu barisan Banteng Merah dan membentuk Tentara Keamanan Tionghoa (Hua Chiao Tse An Hui) untuk berjuang bersama arek Surabaya mempertahankan Surabaya dari serangan tentara Inggris (Setyautama 2008, 63; Siauw 1981, 77).

3. Han Pik Nio

Ia lahir di Surabaya, pernah mengikuti pendidikan di ELS Jombang dan mengikuti kursus Bahasa Inggris di Surabaya. Meskipun berlatar pendidikan Barat, ia tertarik mempelajari bahasa Kuo Yu di rumah. Ia juga merupakan salah satu wanita Tionghoa yang aktif berorganisasi, dibuktikan dengan aktivitasnya dalam perkumpulan H.C.T.N.H. Surabaya (Tan 1935, 47). H.C.T.N.H. yang awalnya bernama Hak Sing Hwee adalah organisasi pemuda-pemudi Tionghoa yang bertujuan memajukan olah raga, pendidikan, dan sosial. Ia aktif di bagian wanita atau Dames Afdeeling, yaitu bagian yang bertujuan memajukan wanita Tionghoa agar mampu tampil di muka umum, terutama dalam kegiatan sosial, keterampilan rumah tangga, pendidikan, musik, dan olah raga (Taruna Nan Harapan 1960). Salah satu pandangannya tentang pendidikan wanita adalah tentang kemajuan pendidikan wanita yang menurutnya terdapat kekurangan karena kelemahan pendidikan dalam keluarga, sehingga menghasilkan generasi wanita Tionghoa yang kurang memahami dan menerapkan sopan santun (Tan 1935, 47).

Gambar 1. Regu Bola Basket Wanita H.C.T.N.H.



(Sumber: 40 Tahun Taruna Nan Harapan Surabaya (Taruna Nan Harapan 1960))

4. Kwee Hing Tjiat

Ia lahir di Surabaya pada tahun 1891, menjalani pendidikan di Instituut Buys dan melanjutkan ke BAS. Perkembangan pers berbahasa Melayu menarik minatnya untuk terjun dalam kegiatan jurnalistik. Baginya, pers menjadi media menyalurkan gagasan dan pemikirannya tentang beragam peristiwa yang dialami oleh komunitas Tionghoa. Oleh sebab itu, ia rela mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menerbitkan beberapa mingguan dan surat kabar. Sebagai seorang jurnalis, ia pandai menangkap situasi untuk dijadikan bahan menulis. Tulisannya dikenal sangat tajam, bahkan tidak jarang membuat geram beberapa orang Tionghoa yang ia kritik.

Pada Oktober 1911, ia menerbitkan mingguan *Asia*, tetapi pada Oktober 1913 ia meninggalkan mingguan tersebut dan menerbitkan mingguan *Bok Tok*, yang pada 1914 namanya diganti menjadi *Tjhoen Tjhioe*. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun, ia memiliki keyakinan bahwa wartawan yang memperhatikan persoalan politik, sosial, agama, dan lain-lain mampu

memperbaiki kondisi masyarakat (Suryadinata 1990, 24). Selain sebagai tokoh yang kritis terhadap perubahan Tionghoa, ia juga dikenal sebagai penggagas asimilasi, yaitu sebuah konsep yang tidak populer dan bertentangan dengan sebagian besar pemikiran orang-orang Tionghoa yang hidup sezaman dengannya.

Kwee Hing Tjiat juga dipengaruhi oleh nasionalisme Tiongkok, dan perannya sangat terlihat ketika menjadi pimpinan redaksi *Sin Po* di Jakarta. Salah satu karyanya yang ia tulis di Jerman dan juga beredar di Hindia Belanda berjudul *Doea Kepala Batoe*. Buku itu berisi tentang kritik terhadap sekolah THHK dan keyakinannya terhadap kemenangan nasionalisme Tiongkok (Kwee 1921, 108–109, 143). Semangat nasionalisme Tiongkok pula yang membuatnya tidak memperoleh izin pulang ke Surabaya karena ia menggunakan paspor Tiongkok, dan akhirnya membuatnya terpaksa menetap di Shanghai selama 10,5 tahun. Ia tetap merindukan tanah kelahirannya, yaitu Jawa (Suryadinata 2010, 24).

Selama di Tiongkok, Kwee Hing Tjiat banyak mengirim tulisan ke majalah *Hoakiao* yang terbit di Surabaya. Tulisannya banyak mengkritik sekolah THHK yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan generasi Tionghoa di Jawa, terutama dengan kualitas guru-gurunya yang kurang memiliki kemampuan mengajar. Ia juga tidak setuju bahwa bahasa Tionghoa adalah satu-satunya sarana memperkuat nasionalisme Tiongkok (*Soera Publiek* 14 Januari 1925). Selain itu, ia juga menilai bahwa sistem kepengurusan sekolah THHK yang buruk akan lebih baik jika dibubarkan dan diganti dengan sekolah akademi (*Hoakiao* 10 Maret 1926). Selain menyerang sekolah THHK, Kwee Hing Tjiat juga mengkritik perkumpulan Khong Kauw Hwee, yaitu perkumpulan Agama Khonghucu. Menurutnya, ajaran Khonghucu telah ketinggalan zaman dan menganjurkan agar orang Tionghoa di Hindia Belanda tidak memeluk agama apa pun (Suryadinata 2010, 26–27).

Tulisan-tulisan Kwee Hing Tjiat membuktikan bahwa meskipun lama tinggal di Tiongkok, perhatiannya tetap tertuju ke Hindia Belanda, tanah kelahirannya. Tampaknya ia juga memperhatikan kemunculan aliran baru, yaitu nasionalisme Indonesia di kalangan Tionghoa Peranakan dan dukungan tokoh-tokoh pergerakan bumiputera terhadap aliran tersebut, yaitu dr. Tjipto Mangoenkusumo, dr. Soetomo, Mr. Singgih, dan dr. Satiman. Berdirinya Partai Tionghoa Indonesia oleh Liem Koen Hian memengaruhi pemikirannya tentang bagaimana seharusnya nasionalisme Tionghoa Peranakan di Hindia Belanda. Dalam satu tulisan berjudul “Baba Dewasa,” ia menganjurkan agar Tionghoa Peranakan berasimilasi total dengan masyarakat bumiputera (Suryadinata 2010, 29).

5. Lie Ping An

Ia lulusan ELS dan Hoogere Burger School (HBS) Surabaya dan menjadi anggota Dewan Pemerintah Kota Surabaya pada 1924 dan anggota Dewan Dewan Propinsi Jawa Timur (Setyautama 2008, 181). Ia adalah salah satu dari Tionghoa Surabaya yang selain mampu menjadi elite pemerintah juga berada di jajaran elite nonpemerintah. Kemampuan tersebut disebabkan ia memiliki kemampuan bahasa Belanda, Kuo Yu, dan Melayu. Beberapa perkumpulan yang ia ikuti adalah adalah *Gymnastiek and Schermvereeniging Tionghoa* yang berdiri pada 1908 (*Tjhoen Tjhioe* 11 November 1928), *Gemeentelijk Armenzorg* (Badan Amal), dipercaya sebagai pengurus pasar malam, anggota *Europesch School Commissie*, *Chung Hua Hwee Surabaya*, *T.H.H.K.*, *Sing Kie Hwee*, *Thay Tong Bong Yan*, *H.C.T.N.H.*, dan *Tiong Hoa*, yaitu perkumpulan olah raga yang terkemuka di Surabaya (Setyautama 2008, 181).

6. Lie Ping Hoo

Ia adalah adik dari Lie Ping An, seorang anggota Chung Hua Hui (CHH), yaitu organisasi politik yang didirikan Tionghoa Peranakan dan berorientasi pada pemerintah kolonial Belanda, sekaligus Gementeraad Surabaya. Lie Ping Hoo lahir di Surabaya, menempuh pendidikan di Institut Buys, melanjutkan ke HBS Surabaya, pendidikan dokter di Nederlandsch Indisch Artsenschool (NIAS) selama empat tahun, dan School tot Opleiding van Indlansche Artsen (STOVIA) satu tahun. Sebagai dokter, ia aktif dalam aktivitas kesehatan (Tan 1935, 15)

7. Liem Sam Tjiang

Ia alumnus HCS Surabaya, HBS, dan sempat mengikuti pendidikan di NIAS Surabaya. Ia aktif mengelola poliklinik Tionghoa Ie Sia Malang dan menjadi anggota Partai Tionghoa Indonesia (Tan 1935, 27). Pergaulan dengan komunitas non-Tionghoa selama di HBS dan NIAS menumbuhkan kesadarannya terhadap kebangsaan Indonesia.

8. Liem Hwie Giap

Ia adalah lulusan HBS Surabaya dan selama sekolah ia menjabat sebagai ketua Chung Hsioh, yaitu perkumpulan siswa sekolah tingkat menengah yang beranggotakan siswa Tionghoa dari sekolah berbahasa pengantar Bahasa Belanda. Pada tahun 1930 ia menjadi ketua CHH Surabaya, pengurus Rumah Sakit Tionghoa Surabaya (Soe Soei Tionghoa Ie Wan) ketua Cina Institute pada 1941, dan Direktur Oei Tionghoa Ham Concern di Surabaya (Setyautama 2008, 201).

9. Lo Swie Tek

Ia lahir di Surabaya dan menjalani pendidikan di Sekolah Hokkian. Pada tahun 1902 ia menerbitkan *Loen Boen*, yaitu organ Tionghoa Hwee Koan Surabaya yang di dalamnya banyak memuat halaman tentang ajaran Khonghucu (Adam 2003, 131).

10. Oei Kiauw Pik

Ia lulusan ELS dan HBS Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universiteit van Amsterdam dan menjadi salah satu pendiri CHH. Setelah kembali ke Surabaya, pada 1923 bersama beberapa pengurus Siang Hwee Surabaya, yaitu Lauw Yuk Tjay (ketua) dan Yap Tan Boe (sekretaris) mendirikan poliklinik di Handelstraat nomor 21–22 untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Poliklinik tersebut menjadi cikal bakal Soe Soei Tionghoa Ie Wan yang resmi berdiri pada 25 November 1927 dan Oei Kiauw Pik menjadi ketuanya. Seiring dengan peningkatan jumlah pasien dan beragam penyakit yang harus diobati, pada 1931 ia memperluas poliklinik dengan menyewa rumah di Jalan Kenjeran 45. Kemudian pada 1937, kembali menambah poliklinik di gedung bekas sekolah T.H.H.K., di belakang Klenteng Boen Bio yang berada di Jalan Kapasan (Setyautama 2008, 272). Membangun poliklinik umum adalah sumbangan kepedulian Tionghoa Peranakan terhadap kesehatan masyarakat Surabaya.

11. Ong Tjing Hwie

Ia lahir di Surabaya, menerima pendidikan sekolah dasar di Institut Buys, kemudian HBS Surabaya. Setelah lulus sekolah, ia menjabat sebagai pengurus Rijstpellerijen Bond, anggota Provinciale Raad Oost Java, dan pengurus Chung Hsioh Surabaya. Di dalam berorganisasi, ia memiliki pendapat bahwa jika karakter seorang anggota perkumpulan atau organisasi tidak baik, interaksi sosialnya juga tidak baik (Tan 1935, 12)

12. Tan King Djien

Ia lahir di Surabaya dan lulusan Tiong Hoa Hak Tong atau Tiong Hoa Hwee Koan Surabaya. Ia memiliki ketertarikan dalam dunia jurnalistik yang dibuktikan dengan kemampuannya mengelola majalah atau *maanblad Liberty* dan *Tjerita Roman* yang terbit di Surabaya (Tan 1935, 16). *Liberty* adalah majalah bulanan berbahasa Melayu yang memuat cerita-cerita pendek, syair-syair, halaman istri yang membahas tentang pengetahuan untuk wanita, serta halaman Riwayat Pendek yang membahas tentang tokoh-tokoh dunia terkemuka. Sementara itu *Tjerita Roman* adalah majalah bulanan yang kantornya berada di Suikerstraat 1–3 Surabaya. Majalah tersebut terbit dalam bahasa Melayu dan setiap edisi memuat satu cerita yang ditulis oleh penulis Tionghoa Peranakan dari Surabaya dan kota-kota lainnya (*Tjerita Roman* Januari 1938, 109)

13. Tan Ping Tjiat

Ia lahir di Surabaya dan pernah menerima pendidikan di Sekolah Hokkian (Tan 1935, 28). Pada 1920-an ia aktif dalam perkumpulan T.H.H.K., menjadi salah satu Tionghoa Peranakan yang gigih mempertahankan pelajaran bahasa Kuo Yu di sekolah T.H.H.K. dan menolak pelajaran bahasa Belanda yang ia sebut “bahasa didong” (*Soeara Publiek* 3 Februari 1927).

14. The Kian Sing

Ia lahir di Surabaya pada 1880 dan menerima pendidikan di Sekolah Hokkian Surabaya. Ia menguasai bahasa Hokkian, Kuo Yu atau Mandarin, dan Belanda (Setyautama 2008, 411). Meskipun hanya berpendidikan sekolah tingkat dasar tradisional, ia memiliki pengalaman organisasi dan pergaulan yang cukup luas. Pada awalnya ia memiliki orientasi ke Tiongkok, terbukti dari beberapa organisasi yang ia ikuti misalnya pada 1913 menjadi ketua Hoa Kiauw Tjong Hwee Surabaya, yaitu Perhimpunan Umum Sosial dan Budaya Tionghoa Perantauan (*Statuten dan Algemeen Huishoudelijk Reglement dari Vereeniging Hea Kiauw Tjong Hwee* 1926, 10–11); anggota perkumpulan Joe Tek Hwee Kwan, Soe Po Sia, yaitu perkumpulan taman bacaan yang bertujuan menyebarkan gagasan nasionalisme Tiongkok (Suryadinata 1994, 23); anggota Djawa Hak Boe Tjong Hwee, yaitu Perhimpunan Pendidikan Tionghoa di Jawa; anggota Siang Hwee Surabaya, yaitu Kamar Dagang Tionghoa Surabaya; dan Ketua T.H.H.K. Surabaya pada tahun 1927. Pada tahun 1927 ia memberi pendapat tentang T.H.H.K. yang sebaiknya diubah menjadi National HCS, tetapi ditolak oleh sebagian besar pengurus T.H.H.K. (*Djawa Tengah* 2 Maret 1927). Hal yang menarik adalah gagasannya tentang nasionalisme Tiongkok, bahwa nasionalisme dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan memperbaiki kualitas pendidikan generasi Tionghoa (*Djawa Tengah* 14 Februari 1927).

15. Tio Lin Khing

Tio Lin Khing lahir di Surabaya dan pernah menerima pendidikan Sekolah Hokkian. Pendidikan yang ia terima mendorongnya mengikuti beberapa perkumpulan yang bertujuan menyebarkan budaya dan gagasan nasionalisme Tiongkok, yaitu perkumpulan Gie Hoo, Hoa Kiauw Bian Hap Hwee, Boen Bio. Poo Kie, Kian Gie, Siang Hwee, Khong Kauw Hwee, Soe Boen Hwee, Tay Thong Bong Yan, dan T.H.H.K (Tan 1935, 53). Ia adalah satu-satunya yang mendukung The Kian Sing ketika mengajukan usul agar sekolah T.H.H.K. diubah menjadi National HCS. Tujuannya adalah menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan generasi Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda, yaitu memiliki kemampuan berbahasa Belanda dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (*Swara Publiek* 3 Februari 1927).

16. Tjan Kiem Bie

Tjan Kiem Bie menempuh pendidikan di ELS Surabaya. Kemampuan berbahasa Belanda dan ketertarikan terhadap pers mendorongnya aktif menulis di surat kabar *De Locomotief* (Setyautama 2008, 431), yaitu surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang sejak 1852 (Adam 2003). Selanjutnya, pada 1915–1916 ia menjadi kepala redaksi *Tjhoen-Tjhioe*, surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa atau Melayu Pasar yang terbit di Surabaya. Kiprahnya di penerbitan surat kabar berbahasa Melayu Pasar menunjukkan bahwa Tjan Kiem Bie adalah Tionghoa Peranakan yang memiliki pergaulan luas, karena melalui surat kabar tersebut menghubungkan Tjan Kiem Bie dengan semua ras, yaitu Indo, Peranakan Arab, Tionghoa Peranakan, dan bumiputera dari semua suku dan dialek bahasa. Seiring dengan pergaulannya yang semakin luas, Tjan Kiem Bie mulai mengenal gagasan kebangsaan Indonesia di kalangan Peranakan. Perkenalannya dengan Liem Koen Hian turut mengantarnya menjadi anggota Partai Tionghoa Indonesia, dan pada 1938, oleh PTI, ia diajukan menjadi calon dewan PTI dalam pemilihan *volksraad* (*Bataviaasch Nieuwsblad* 7 September 1938).

17. Tjia Tjiep Ling

Tjia Tjiep Ling adalah Tionghoa Peranakan, anak dari Luitenant Tjia Sien Tjay. Diduga ia mendapat pendidikan dari guru yang didatangkan ke rumah. Ikatan emosional yang terbangun sejak ia mengenal budaya Tionghoa mengakibatkan ketika memasuki usia remaja, ia aktif dalam beberapa perkumpulan yang bertujuan membela kepentingan komunitas Tionghoa. Pada 1900 ia mendirikan perkumpulan bernama Tong Gie Hwee yang bertujuan melawan sinyo-sinyo yang mengganggu kehormatan perempuan-perempuan Tionghoa. Ia juga aktif di perkumpulan T.H.H.K., Sing Khie Hwee, Siang Hwee, dan aktif mengirim artikel ke *Tjhoen Tjhioe*, *Bintang Soerabaia*, *Soe Lin Po*, *Primbon Soerabaia*, *Bok Tok*, dan *Pewarta Soerabaia*. Sebagai seorang Tionghoa Peranakan yang dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme Tiongkok, ia berpendapat “[s]oeda menjadi satoe *karma* apabila orang dilahirkan djadi saorang Tionghoa *koedoe* berlakoe Tionghoa, bersifat Tionghoa dan menganoet *cultuur* Tionghoa djoega. Bertentangan sama ini, ia anggep bertentangan sama karmanja sendiri [...]” (*Sin Po Wekelijksche Editie* 22 Februari 1941).

18. Siauw Giok Tjhan

Siauw Giok Tjhan adalah Tionghoa Peranakan yang berasal dari Kapasan, salah satu wilayah Pecinan di Surabaya yang memperoleh julukan Kampung Kungfu dan penghuninya disebut buaya Kapasan. Julukan itu menunjukkan bahwa masyarakat Kapasan memiliki karakter pemberani (Oei 2022). Menurut Siauw Giok Tjhan, keberanian masyarakat di sana dipengaruhi oleh profesi sebagian dari mereka, yaitu sebagai penjaga rumah orang-orang kaya, penjaga rumah judi, dan pengawal pribadi orang-orang kaya (Siauw 1981, 12). Berada di tengah masyarakat yang berkarakter pemberani, ia tumbuh menjadi generasi yang kritis, terbuka, dan pemberani. Pada usia anak-anak ia sempat menerima pendidikan di sekolah T.H.H.K. Tidak berlangsung lama, ia pindah ke Institut Buys selama beberapa bulan, kemudian pindah lagi ke ELS dan melanjutkan ke HBS. Ia juga dikenal aktif dalam perkumpulan H.C.T.N.H. Surabaya dan kepanduan (Setyautama 2008, 322). Pengalaman pendidikan dan perkumpulan membuat Siauw memiliki pergaulan yang cukup luas. Pengetahuan tentang konsep nasionalisme, dan kisah tentang perjuangan bangsa-bangsa meraih kemerdekaan sangat memengaruhi pemikirannya. Ketika Liem Koen Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada 1932, Siauw Giok Tjhan juga turut menjadi anggotanya. Menurut Siauw Giok Tjhan, kondisi senasib yang menimpa Tionghoa Peranakan dan bumiputera di Jawa Timur pada masa krisis ekonomi pada 1930 mempercepat kesadaran kebangsaan Indonesia (Siauw 1981, 37).

Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak elite di Surabaya yang memiliki peran dalam perubahan sosial, budaya, dan politik komunitas Tionghoa di Surabaya. Keikutsertaan mereka dalam perkumpulan dan organisasi yang anggotanya beragam menandakan bahwa pada abad ke-20 komunitas Tionghoa mulai bergerak memasuki organisasi yang lebih terbuka, meskipun belum dapat sepenuhnya meninggalkan ikatan primordial yang tercermin dengan keikutsertaan mereka dalam perkumpulan marga, asal leluhur, dan perkumpulan yang beranggotakan sesama Tionghoa. Hal itu disebabkan oleh pertama, pemikiran bahwa ada rasa kekawatiran dalam proses integrasi yang baru berjalan. Hal itu juga didukung dengan sikap tokoh-tokoh bumiputera yang belum sepenuhnya menerima komunitas Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan hanya Partai Gerindo yang terbuka untuk komunitas Tionghoa (*Bataviaasch Nieuwsblad* 4 Desember 1939).

Alasan kedua adalah adanya pemikiran bahwa perkumpulan berdasarkan ikatan primordial dapat mendukung organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Hal itu dibuktikan dengan dukungan Perhimpunan Boen Bio, Khong Kauw Hwee, dan Nan Yang Societeit terhadap Partai Tionghoa Indonesia. Ketiga perkumpulan tersebut juga memberi bantuan dana dan gedung ketika Partai Tionghoa Indonesia membuka sekolah yang kemudian dinamakan Sekolah PTI.

SIMPULAN

Akhir abad ke-19 hingga 1942 adalah periode yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan komunitas Tionghoa di Surabaya. Ada beberapa motif atau alasan yang mendorong pembukaan sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Motif pertama adalah motif penguatan identitas budaya yang menghasilkan kelompok elite yang memiliki nasionalisme kultural Tionghoa. Mereka membangun perkumpulan-perkumpulan berdasarkan ikatan primordial. Motif pertama tersebut muncul pada periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan didorong pula oleh kepentingan Belanda sebagai usaha mempertegas struktur sosial masyarakat Hindia Belanda.

Motif kedua adalah membangun identitas politik. Motif ini muncul pada awal abad ke-20 hingga 1942 yang merupakan era pergerakan bagi komunitas Tionghoa dan bumiputera. Pergumulan identitas politik menghasilkan generasi Tionghoa yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang berorientasi pada Tiongkok, Belanda, dan Indonesia. Masing-masing kelompok ingin menyebarkan gagasan nasionalisme melalui pendidikan, sehingga muncul tiga kelompok elite, yang aktif terlibat dalam perkumpulan-perkumpulan Tionghoa perantaraan pendukung gerakan nasionalisme Tiongkok, kelompok elite yang mendukung pemerintah kolonial Belanda, dan kelompok elite yang aktif dan mendukung organisasi yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Hal yang menarik adalah ketiga kelompok elite tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu tidak menghilangkan budaya Tionghoa sebagai identitas etnis.

Motif ketiga adalah meningkatkan dan memperkuat kondisi ekonomi. Semua kelompok elite berpendapat bahwa bahasa pengantar, yaitu bahasa asing pendukung memiliki pengaruh yang kuat agar generasi Tionghoa dapat memperoleh penghidupan yang layak, baik melalui pekerjaan yang diperoleh di Hindia Belanda maupun aktivitas perdagangan internasional. Perdebatan yang berlangsung sejak kemunculan HCS mengakibatkan bermunculan sekolah-sekolah Tionghoa dengan bahasa pengantar yang beragam, ditambah dengan kemampuan bahasa lainnya, yaitu bahasa Inggris dan Melayu. Motif ketiga ini menghasilkan kelompok elite dengan bidang pekerjaan yang beragam sehingga meruntuhkan pendapat bahwa komunitas Tionghoa identik dengan pekerjaan sebagai pedagang. Selain pendidikan, situasi perubahan

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pergaulan juga berdampak terhadap perubahan pandangan kelompok elite sehingga dalam kurun waktu kurang lebih lima puluh tahun, seorang elite Tionghoa dapat mengalami perubahan dalam memandang orietasi budaya, politik, dan ekonomi komunitas Tionghoa. Keberagaman kelompok elite Tionghoa yang muncul pada akhir abad ke-19 hingga 1942 turut mewarnai corak khas sejarah masyarakat Kota Surabaya, yaitu kemunculan tokoh-tokoh Tionghoa yang menjadi penggagas semangat kebangsaan Indonesia dan membantu mengurangi persoalan kesehatan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ahmat. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Alumni Shin Hwa High School Surabaya. 2002. *Shin Hwa High School Surabaya 1934–2002*. Surabaya: Alumni Shin Hwa High School Surabaya.
- Anonim 1925. "Pendidikan Atawa Peladjaran." *Khong Kauw Goat Po* nomor 22–23 tahun ke-2, 9 Agustus–18 September.
- Bataviaasch Nieuwsblad*. 7 September 1938.
- Berita Soerabaja*. 15 September 1936.
- Bintang Soerabaia*. 6 Juli 1906.
- . 7 Agustus 1906.
- . 8 Agustus 1906.
- . 27 Januari 1908.
- Boachi, Aquasie. 1856. "De Chinezen Op Het Eiland Java." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia)* 4, Januari.
- Brugmans, I. J. 1938. *Geschiedenis Van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Batavia: J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij.
- Perkumpulan Hwie Tiauw Ka Surabaya. 2010. *Edisi Khusus HUT ke-190 Perkumpulan Hwie Tiauw Ka Surabaya*. Surabaya: Perkumpulan Hwie Tiauw Ka.
- Djawa Tengah*. 9 Februari 1927.
- . 2 Maret 1927.
- Djhung, Dony. 2022. "Sejarah Etnis Tionghoa di Surabaya." Wawancara oleh Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, 1 Juli.
- Claver, Alexander. 2014. *Dutch Commerce and Chinese Merchant in Java*. Leiden & Boston: Brill.

- Diffelen, R. van. 1936. "Het Onderwijs voor Chinezen." *Koloniale Studien* XX.
- Govaars, Ming. 2005. *Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900–1942*. Singapore: Chinese Heritage.
- Groeneboer, Kees. 1995. *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600–1950: Sejarah Politik Bahasa*, Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
- Handinoto. 2015. *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Haryono, Steve. 2017. *Perkawinan Strategis: Hubungan Keluarga Antara Opsir-Opsir Tionghoa dan Cabang Atas di Jawa pada Abad ke-19 dan 20*. Jakarta: Subur.
- Hsu. 1983. "Para Cendekiawan Menjadi Abdi Negara." Dalam *Elite dalam Perspektif Sejarah*, disunting oleh Sartono Kartodirdjo. Jakarta: LP3ES.
- Javasche Courant*. 20 Mei 1904.
- Kwee, Hing Tjiat. 1921. *Doea Kepala Batoe*. Berlin: t.pn.
- Kwee, Tek Hoay. 1934. "Pioneers dalam Gerakan Khong Kauw Soerabaja." *Moestika Dharma* 31, Oktober.
- Nio, Joe Lan. 1934. "De Tiong Hoa Hwee Koan Beweging." *Indische Gids*, jilid I.
- Oei, Hiem Hwie. 2022. "Sejarah Etnis Tionghoa di Surabaya." Wawancara oleh Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, 20 Desember.
- Oen, Tjhing Tiau. 1953. "Anak Murid THHK Akan Dituntun?" Dalam *Buku Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 THHK Surabaya 1903–1953*. Surabaya: t.pn.
- Ong, Hok Ham. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Phoa, Kian Sioe. 1950. "Sedikit tentang Kapten, Letnan Tionghoa dan Kongkoan di Djakarta." *Tjerman* 14, 1 Djuni.
- Pewarta Soerabaia*. 26 Oktober 1916.
- Riyanto, Bedjo. 2000. *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870–1915)*. Yogyakarta: Tarawang.
- Salmon, Claudine. 2005. "Confucianists and Revolutionaries in Surabaya (c1880–c1906)." Dalam *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, disunting oleh Helen Pausacker. Singapore: ISEAS.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.

- Setyautama, Sam. 2008. *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sarkawi. 2015. *Sejarah Sekolah Makasar*. Makasar: Inninawa.
- Schlegel, G. 1885. *Chineesche Begrafenis en Huwelijksondermeming Gevestigd te Soerabaya*. Leiden: Brill.
- Siauw, Giok Tjhan. 1981. *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*. Jakarta & Amsterdam: t.pn.
- Sin Jit Po*. 12 Juli 1926
- Sin Po Jubileum Nummer*. 1910–1935.
- Sin Po Wekelijksche Editie*. 12 Juni 1926.
- . . 14 Februari 1931.
- . . 3 September 1938.
- . . 22 Februari 1941.
- . . 22 November 1941.
- Sin Tit Po*. 17 Agustus 1937.
- Soerabaijasch Handelsblad*. 1 April 1932.
- Statuten dan Algemeen Huishoudelijk Reglement dari Vereeniging Hea Kiauw Tjong Hwee*. 1926. Surabaya: t.pn.
- Suryadinata, Leo. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- . 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, diterjemahkan oleh Dede Oetomo). Jakarta: Gramedia.
- . 1990. *Mencari Identitas Nasional dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: LP3ES.
- . 2010. *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiap Hien*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Susan, Novri. 2019. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Swara Publiek*. 14 Januari 1925.
- . . 3 Februari 1927.
- . . 18 Februari 1931.
- Taruna Nan Harapan. 1960. *40 Tahun Taruna Nan Harapan*. Surabaya: Taruna Nan Harapan.

Tjiong, Tjing Khoen. 1975. "Asal Oesoelnja Boen Bio Soerabaja." *Gentrika* 24–25.

Tan, Hong Boen. 1935. *Orang-Orang Tionghoa yang Terkemoeka di Jawa*. Solo: The Biographical Publishing Center.

Tedja, Widyanto. 2006. "Sejarah Etnis Tionghoa di Surabaya." Wawancara oleh Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, 10 Maret.

The, Kian Lok. 2001. *Rumah Abu: Sebuah Kenangan "Rumah Sembahyang The Goon Tjing (The Sie Siaw Yang Tjohbiauw) 1883–2001."* Surabaya: t.pn.

Tjerita Roman. Djanuari 1938.

Tjermin. 1 Djuni 1950, no. 14,

Tjermin. 1–15 Djuli 1950, no. 16–17,

Tjhoen Tjhioe. 11 November 1928.

Tjieng, Hiang Thung. 1929. "Cultureele Vraagstukken van de Chineezen in Indie." *China Een Driemandelyksch Tijdschrift* XIII.

Verslag Der Gemeente Soerabaja Over Het Jaar 1927.

Verslag Der Gemeente Soerabaja Over Het Jaar 1940.

Wertheim, W. F. 1956. *Indonesia Society in Transition*. Bandoeng: Soemoer.